

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah guna untuk mengembangkan suatu daerah sehingga nantinya berguna demi kepentingan daerah itu sendiri baik untuk menunjang prasarana dan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan perekonomian. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2000 mendeklarasikan suatu kebijakan yang dikenal dengan sebutan The MilLenium Development goals (MDG's) yang harus di capai pada tahun 2015 dengan 189 negara sebagai anggota dimana salah satu tujuan utamanya adalah menghentaskan kemiskinan. Ketika MDGs berakhir pada tahun 2015 maka di lanjutkan dengan kebijakan yang selanjutnya dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dimana kebijakan tersebut di deklarasikan pada tahun 2015 di markas PBB dengan tujuan untuk terciptanya ekonomi berkelanjutan pada tahun 2030. Dengan adanya program yang dicanangkan oleh PBB tersebut dapat memberikan dampak

yang lebih signifikan lagi terutama dalam kesejahteraan negar-negara didunia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan masyarakat tercipta ketika beberapa unsur terpenuhi seperti halnya kebutuhan fisik dan rohani, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti tempat tinggal serta mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat (BPS, 2018).

Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka di kategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Hal itu yang menyebabkan kemiskinan dijadikan salah satu sasaran dalam pembangunan nasional agar nantinya bisa menurunkan kemiskinan dan terciptanya kesejahteraan (Amali, 2017).

Menurut Suparlan (2000) dalam Pratama (2014) memberikan pengertian tentang kemiskinan yaitu dimana suatu keadaan yang serba berkekurangan harta dan benda yang diderita oleh masyarakat yang berada dilingkungan yang serba miskin dan kekurangan dari berbagai aspek seperti uang, modal, pengetahuan, kekuatan, akses terhadap fasilitas umum maupun dalam hal kesempatan dalam berusaha dan bekerja. Dengan begitu

kemiskinan juga merupakan salah satu faktor penghambat seseorang dalam melakukan sesuatu dalam menjalani kehidupan dimana mereka hanya bisa menerima keadaan tanpa melakukan apapun sehingga mereka tidak bisa berusaha lebih keras lagi agar bisa meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi.

Menurut Andre Bayo Ala (1981) dalam Yuliadi (2007) menyatakan terdapat beberapa aspek kemiskinan yaitu (1) bahwa kemiskinan sifatnya multidimensional karena menyangkut karakter manusia yang memerlukan berbagai dimensi kehidupan. Kemiskinan meliputi aspek primer yaitu miskin asset organisasi sosial politik, pendidikan dan keterampilan. Dan juga aspek skunder, yaitu miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan juga menyangkut berbagai dimensi diantaranya berupa kekurangan protein dan kalori (*malnutrisi*), sarana perumahan yang tidak sehat, pendidikan yang tidak memenuhi standar kualitas dan fasilitas kesehatan yang terbatas. (2) aspek kemiskinan saling berkaitan yang berarti bahwa persoalan kemiskinan menyangkut dimensi kehidupan individu dan sosial, ekonomi dan non-ekonomi yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. (3) kemiskinan menyangkut nasib kehidupan manusia yang berarti bahwa persoalan kemiskinan tergantung bagaimana manusia dalam mensikapinya.

Kemiskinan merupakan penyebab kualitas hidup terjerumus kedalam lembah kesengsaraan hidup baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemiskinan yang sering terjadi pada saat ini bukan hanya sebatas

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan sumber daya alam. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi sepenuhnya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan sampai saat ini masih belum sepenuhnya bisa teratasi, meskipun dalam beberapa kurun waktu tertentu bisa memberikan pengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, sehingga sepatutnya pemerintah dalam merealisasikan program-program yang menjadi upaya dalam pengentasan kemiskinan bisa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat langsung agar program-program bisa tepat sasaran dan bisa mewujudkan pembangunan yang merata.

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar permasalahan biasa, melainkan permasalahan kronis yang sering terjadi. Kemiskinan juga merupakan permasalahan klasik yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan sehingga kemiskinan dijadikan musuh-musuh bagi negara-negara didunia terutama bagi negara berkembang (Yuliadi, 2016).

Kemiskinan juga merupakan masalah yang terjadi di provinsi Jawa Timur. Pulau Madura yang termasuk kedalam Provinsi Jawa Timur

termasuk kedalam kabupaten dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi se provinsi Jawa Timur.

**Tabel 1. 1**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (dalam satuan Persen)**

No	Kabupaten /Kota	Tahun 2017	No	Kabupaten /kota	Tahun 2017
1	Kab. Sampang	23.56	20	Kab. Jember	11
2	Kab. Bangkalan	21.32	21	Kab. Lumajang	10.87
3	Kab. Probolinggo	20.52	22	Kab. Magetan	10.48
4	Kab. Sumenep	19.62	23	Kab. Jombang	10.48
5	Kab. Tuban	16.87	24	Kab. Pasuruan	10.34
6	Kab. Pamekasan	16	25	Kab. Mojokerto	10.19
7	Kab. Pacitan	15.42	26	Kab. Blitar	9.8
8	Kab. Ngawi	14.91	27	Kab. Banyuwangi	8.64
9	Kab. Bondowoso	14.54	28	Kota Kediri	8.49
10	Kab. Lamongan	14.42	29	Kab. Tulungagung	8.04
11	Kab. Bojonegoro	14.34	30	Kota Blitar	8.03
12	Kab. Situbondo	13.05	31	Kota Probolinggo	7.84
13	Kab. Trenggalek	12.96	32	Kota Pasuruan	7.53
14	Kab. Gresik	12.8	33	Kab. Sidoarjo	6.23
15	Kab. Madiun	12.28	34	Kota Mojokerto	5.73
16	Kab. Kediri	12.25	35	Kota Surabaya	5.39
17	Kab. Nganjuk	11.98	36	Kota Madiun	4.94
18	Kab. Ponorogo	11.39	37	Kota Batu	4.31
19	Kab. Malang	11.04	38	Kota Malang	4.17

*Sumber: BPS 2018*

Dari tabel diatas. menunjukkan persentase penduduk miskin dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari kabupaten/kota yang ada secara umum masih terdapat cukup tingginya persentase penduduk miskin yang terjadi meskipun cenderung mengalami penurunan. Cukup tingginya persentase penduduk miskin juga terjadi kepada empat kabupaten

yang ada di Pulau Madura. Dimana pada tahun 2017 kabupaten yang terdapat di Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep termasuk kedalam 10 besar dengan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi.

Pada tahun 2017 Kabupaten Sampang merupakan kabupaten dengan tingkat persentase penduduk miskin yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur dan di Pulau Madura dimana persentase penduduk miskin pada tahun 2017 adalah sebesar (23.56%). Disusul Kabupaten Bangkalan menempati posisi kedua di Pulau Madura dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu sebesar (21.32%). Sedangkan Kabupaten Sumenep menempati posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan sebesar (23.56%). Dan kabupaten dengan persentase penduduk miskin yang terendah di Pulau Madura yaitu Kabupaten Pamekasan dimana dengan persentase penduduk miskin sebesar (16%) pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2017.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Menurut Meier dan Baldwin dalam Yuliadi (2007) menyatakan bahwa masalah kemiskinan ditimbulkan oleh adanya saling mempengaruhi antara masyarakat yang masih dalam keadaan terbelakang dan tradisional dengan kekayaan sumber daya alam yang belum dapat di kembangkan. Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia, dimana ketika pembangunan manusia rendah, akan berakibat terhadap rendahnya produktivitas manusia dalam bekerja. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan

upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur pembangunan dalam suatu negeri. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi kekayaan bagi negara, akan tetapi ketika sumber daya manusia kurang berkualitas maka akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu negara.

*United Nation Development Programe* (UNDP) mengungkapkan pembangunan manusia adalah suatu proses dalam memperluas beberapa pilihan penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Kualitas sumber daya manusia dapat kita lihat dari beberapa kualitas, diantaranya kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan perekonomian yang semakin membaik. Negara-negara baik negara maju maupun negara berkembang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Pembangunan manusia menjadi salah satu modal penting dan menjadi salah satu penentu dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan komponen-komponen yang pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Komponen ini akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan ekonomi.

Salah satu alternatif yang bisa digunakan dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people-centered development* atau *putting people first* (Korten, 1981: 201 dalam (Kuncoro, 1997). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari

pembangunan dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Potensi yang terdapat dalam pribadi manusia akan bisa maksimal ketika didukung peran serta oleh pemerintah guna memberikan wadah agar seseorang bisa melakukan sesuatu hal yang memang keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena ketika terdapat potensi yang dimiliki seseorang tidak akan optimal tanpa pembangunan manusia yang juga berkelanjutan.

**Tabel 1. 2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2015-2017 (dalam satuan persen)**

Kabupaten	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bangkalan	59.7	60.2	60.7	61.49	62.06	62.3
Sampang	55.8	56.5	57	58.18	59.09	59.9
Pamekasan	61.2	62.3	62.7	63.1	63.98	64.93
Sumenep	60.1	60.8	61.4	62.38	63.42	64.28

*Sumber: BPS 2018*

Dari data yang ada, secara umum menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Madura tahun 2012-2017 mengalami kenaikan. Meskipun demikian kabupaten yang ada di Pulau Madura masih termasuk kedalam kabupaten yang tingkat Indeks Pembangunan Manusianya masih rendah. Kabupaten Sampang adalah kabupaten yang

Indeks Pembangunan Manusia paling rendah yang ada di Pulau Madura dimana Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 adalah sebesar (59.9). Kabupaten kedua yang ada di Pulau Madura dengan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah adalah Kabupaten Bangkalan dimana pada tahun 2017 indeks pembanguna kabupaten Bangkalan sebesar (62.3). Kabupaten Sumenep menempati posisi ketiga dengan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi dimana pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia sebesar (64.28). Sedangkan posisi pertama kabupaten yang ada di Pulau Madura dengan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi adalah Kabupaten Pamekasan dimana data Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 sebesar (64.93).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang juga mempengaruhi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi terhadap suatu negara. Dimana pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan.

Mankiew (2007) dalam Amali (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan dari perhitungan pertumbuhan produk domestik regional bruto yaitu rangkuman aktivitas ekonomi dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu, dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat maka akan meningkatkan jumlah nilai

barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh aktivitas perekonomian, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan diikuti dengan turunnya tingkat kemiskinan.

Sedangkan menurut (Basuki dan Prawoto, 2015), mendefinisikan tentang PDRB, yaitu merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama satu tahun. Sehingga PDRB dijadikan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketika tingkat PDRB suatu daerah rendah, maka potensi penerimaan bagi suatu daerah semakin kecil. Pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu memahami dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat dikurangi.

Pendapatan per kapita juga seringkali digunakan sebagai cerminan pembangunan. Karena pendapatan per kapita bisa memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Priyadi dan Asmoro, 2011).

PDRB yang bertambah bisa digunakan oleh pemerintah dalam mempercepat sektor-sektor strategis seperti halnya dalam mengatasi

kemiskinan dengan mengambil beberapa langkah sebagaimana dapat memberikan bantuan-bantuan materi maupun non materi kepada masyarakat yang nantinya bisa memberikan wawasan keterampilan kepada masyarakat sehingga menghasilkan suatu barang atau memberikan efek terciptanya lapangan pekerjaan. Karena PDRB merupakan salah satu unsur penting dalam pengentasan kemiskinan (Todaro, 2013).

**Tabel 1. 3**  
**PDRB ADHK 2010 Kabupaten di Pulau Madura 2012-2016**  
**(dalam satuan Miliar Rupiah)**

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Bangkalan	16174	16204	17369.2	16907	17019
Sampang	10911	11623.8	11632.9	11875	12607
Pamekasan	7894	8375.2	8846.2	9316.9	9816
Sumenep	17665	20218.1	21476.9	21751	22312

*Sumber : BPS 2019*

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat PDRB ADHK 2010 di Pulau Madura. Dari setiap tahun PDRB di Pulau Madura cenderung naik dimana di Kabupaten Bangkalan PDRB pada tahun 2012 sebesar (16174), 2013 sebesar (16204), 2014 sebesar (17369.2), tahun 2015 sebesar (16906.84) dan pada tahun 2016 (17018.68). Kabupaten Sampang dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 10911, 11623.8, 11632.9, 11875, dan 12606.81. Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 (7894), 2013 (8375.2), 2014 (8846.2), 2015 (9316.86) dan 2016 (9815.77). Sedangkan pada Kabupaten Sumenep pada tahun 2012-2016 adalah sebesar (17665), (20218.1), (21476.9), (21750.58) dan (22311.69).

Indikator lain yang juga mempengaruhi terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang mendasar dan sudah menjadi persoalan yang sering terjadi diberbagai daerah maupun negara-negara didunia. Pengangguran yang tinggi akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Pada kemiskinan pengangguran berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat karena masyarakat tidak mempunyai pendapatan sehingga akan menurunkan tingkat kesejahteraan yang akan dicapai.

O'Campo (2015) dalam Bintang dan Woyanti (2018) mengatakan bahwa bukti-bukti empiris selalu menunjukkan bahwa pengangguran secara langsung akan berdampak kepada meningkatnya kemiskinan. Beberapa dampak dari masalah pengangguran secara tidak langsung akan mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan diakibatkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kebutuhan yang ingin dicapai tidak terpenuhi.

Terjadinya pengangguran disuatu negara dapat dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan disuatu wilayah tertentu tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja atau jumlah permintaan lapangan pekerjaan akan penawaran lapangan pekerjaan tidak seimbang. Oleh karena masarakat yang tidak bisa bekerja mencari alternatif lain untuk mendapatkan pendapatan sehingga kebutuhan seseorang tersebut bisa dicapai. Hal tersebut terjadi dikarenakan

akibat bertambahnya jumlah pertumbuhan tenaga kerja melebihi jumlah kesempatan kerja (Muslim, 2014).

Menurut Sukirno (2004), terdapat efek buruk dari pengangguran adalah menyebabkan kurangnya pendapatan yang bisa diterima oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai. Semakin turun kesejahteraan masyarakat diakibatkan oleh pengangguran yang ada maka peluang untuk terjebak kedalam kemiskinan akan meningkat. Ketika pengangguran disuatu negara buruk, yang terjadi kekacauan sosial politik selalu berlaku dan bisa menimbulkan efek buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Masalah pengangguran dan kemiskinan seringkali terjadi bersamaan, karena kedua masalah ini berkaitan dengan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam suatu wilayah. Pengangguran juga merupakan masalah makroekonomi yang dapat mempengaruhi secara langsung dan merupakan yang paling berat. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004:70).

Pengangguran yang berhubungan dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat menentukan tingkat kesejahteraan yang akan diterima oleh masyarakat. Dimana ketika pengangguran yang terus terjadi akan

menyebabkan masyarakat tidak bisa mendapatkan kesejahteraan yang bisa diterima.

**Tabel 1. 4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten**  
**di Pulau Madura Tahun 2011-2017 (dalam satuan persen)**

Kabupaten	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Bangkalan</b>	3.91	5.32	6.78	5.68	5.00	5.28	4.48
<b>Sampang</b>	3.91	1.78	4.68	2.22	2.51	2.77	2.48
<b>Pamekasan</b>	2.89	2.30	2.17	2.14	4.26	4.19	3.91
<b>Sumenep</b>	3.71	1.19	2.56	1.01	2.07	2.00	1.83

*Sumber : BPS 2019*

Dari data diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka kabupaten di Pulau Madura 2011-2017 menunjukkan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang terdapat di Pulau Madura. Dalam hal ini Kabupaten Bangkalan dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Pulau Madura dimana dari tahun 2011-2017 berturut-turut sebesar (3.91), (5.32), (6.78), (5.68), (5.00), (5.28) dan (4.48). Di Kabupaten Sampang tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2011 (3.91), 2012 (1.78), 2013 (4.68), 2014 (2.22), 2015 (2.51), 2016 (2.77) dan 2017 (2.48). Sedangkan di Kabupaten Pamekasan di tahun 2011 (2.89), 2012 (2.30), 2014 (2.17), 2015 (4.26), 2016 (4.19) dan 2017 (3.91). Dan di Kabupaten Sumenep dari tahun 2011-2017 sebesar (3.71), (1.19), (2.56), (1.01), (2.07), (2.00) dan (1.83).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi sebagai solusi untuk menambah wawasan bagi berbagai pihak untuk mencari dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Madura. Oleh karena itu

penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Pulau Madura Tahun 2010-2017”

### **B. Batasan Masalah**

1. Kabupaten yang diteliti adalah kabupaten yang ada di Pulau Madura yaitu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.
3. Periode penelitian adalah dari tahun 2010-2017.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Pulau Madura?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Pulau Madura?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Madura?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Pulau Madura

2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Pulau Madura.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Madura.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penulis

Dapat memberikan tambahan wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu menerapkan teori yang diterima dibangku perkuliahan dengan realita di masyarakat.

2. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi kemiskinan di Pulau Madura.

4. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan sebagainya dalam menentukan kebijakan daerah terutama mengenai kemiskinan.